Kawal Keuangan Desa, BPKP Ciptakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Selasa, 6 Juni 2017

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kembali menegaskan pentingnya pengawalan keuangan desa untuk mendukung akuntabilitas pembangunan desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014. Menteri dan Kepala Daerah dituntut memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan implementasi UU Desa berjalan dengan baik.

Dalam upaya mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini disebarluaskan kepada seluruh kepala desa untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Desa yang telah berhasil mengimplementasikan SISKEUDES akan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Terdapat dua jenis aplikasi yang dikembangkan untuk mengakomodasi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan implementasinya di lapangan. Kemudahan yang ditawarkan aplikasi ini diharapkan dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasil survei BPKP pada akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat desa yang telah berbasis teknologi (website/internet) dan desa yang minim sarana prasarana. Di sisi lain, terdapat juga desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan belum memiliki prosedur yang jelas.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.